

Affiliation:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi & Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Malang, Indonesia

***Correspondence:**

firdaayu@umm.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/14194>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>

Citation:

xxx. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, x(x), xx-xx.

Article History

Received:

23 March 2022

Reviewed:

01 April 2022

Revised:

21 October 2022

Accepted:

01 November 2022

Topic Article:

Akuntansi Sektor Publik

Article Type: Research Paper

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Rahmani Hafizi, Firda Ayu Amalia*

Abstract:

This research was aimed to analyze the financial performance of the Jember District Government in 2016-2019. This type of research is quantitative descriptive with a case study approach with data collection using documentation techniques and data used was secondary data in the form of a Report on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Jember District 2016-2019. The analysis technique uses financial ratios, namely the degree of decentralization, the regional financial dependence ratio, the regional financial independence ratio, the regional tax effectiveness ratio, the compatibility ratio, the spending efficiency ratio, and the growth ratio. The results showed that the financial performance of the Jember Regency Government based on the degree of decentralization in the less category, the regional financial dependency ratio is very high category, the regional financial independence ratio is very low category with an instructive pattern, the regional tax effectiveness ratio is quite efficient, the ratio of operating expenditure to total expenditure dominates the allocation of expenditure compared to the ratio of capital expenditure to total expenditure, growth ratio of regional original income and income growth ratio experienced positive growth, operating expenditure growth ratio, and capital expenditure growth ratio experienced positive growth.

Keywords: Financial Performance, Financial Ratio, Local Governments

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember periode tahun 2016-2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2019. Teknik analisis menggunakan rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih bergantung kepada dana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hal ini disebabkan derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah termasuk kategori yang belum baik, rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Jember tergolong baik, rasio belanja masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal dan rasio pertumbuhan Pemerintah Jember mengalami pertumbuhan positif, hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan belanja operasional dan rasio pertumbuhan belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) telah diatur dalam peraturan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan. Otonomi daerah menyebabkan indikasi munculnya kewenangan dan kewajiban untuk Pemda dalam memenuhi kegiatan pemerintahan secara mandiri dan tidak mengandalkan pemerintah pusat.

Untuk menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi sangat penting dalam memperhatikan masalah pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah yang baik erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya yang baik dengan menaati peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, tidak tertutup/transparan dan bertanggung jawab (Harahap, 2020:34). Menurut Saputra *et al.* (2018:137), desentralisasi merupakan suatu pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur pemerintahan dan urusan masyarakatnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pemerintah daerah harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk di nilai apakah pemerintah daerah yang berkaitan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum baik, dan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio dan laporan keuangan sebagai alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Anshori, 2019:1114). Untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yang bertujuan untuk menginformasikan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang didapat dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang merupakan perhitungan APBD (Dali *et al.*, 2021:320).

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu instansi yang diukur menggunakan cara tertentu yang berupa realisasi pendapatan dan belanja yang diolah berdasarkan basis akrual yang akan menjadi sebuah keberhasilan instansi untuk mengelola keuangan (Harahap, 2020:34). Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dan hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2016:87).

Kinerja keuangan Pemerintah Jember dianalisis dalam penelitian ini menggunakan pelaporan keuangan karena tidak terlepas dari peran indikator rasio keuangan dalam menganalisis laporan keuangan. Menurut (Kasmir, 2018:104), indikator rasio keuangan adalah kegiatan untuk membandingkan data laporan keuangan. Penelitian ini dipicu oleh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 sampai 2020, peneliti melihat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya kenaikan pada tahun 2018 dan penurunan pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Peneliti menggunakan laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Jember, karena dengan laporan keuangan akan diketahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Jember terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Jember memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan mengevaluasi apakah Pemda Jember sudah mengatur keuangannya dengan baik dan telah tepat sasaran untuk memakmurkan masyarakat. Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Jember adalah dengan menganalisis rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Dali *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Muna tahun 2014-2018 diukur dengan rasio kemandirian masih rendah sekali dan tergolong pada pola hubungan instruktif, rasio efektivitas dalam kategori kurang efektif dan rasio aktivitas sebagian besar dana yang dimiliki masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Enumbi (2021) juga melakukan penelitian tentang “*An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government*” dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal sangat rendah dan PAD kurang mampu mendanai pembangunan daerah, rasio kemandirian di bawah standar, rasio efektivitas secara keseluruhan kurang efektif, dan rasio efisiensi PAD menunjukkan secara rata-rata dianggap efisien. Penelitian ini menambahkan beberapa indikator yang tidak digunakan pada penelitian sebelumnya seperti derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio pertumbuhan.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti perlu alat yang digunakan untuk analisis, salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi adalah menggunakan rasio keuangan. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam APBD, yaitu:

1. Derajat Desentralisasi

Menurut Dali *et al.* (2021:328), desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberi pelayanan umum yang baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang. wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk melakukan hal-hal seperti kewenangan memungut pajak, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Derajat desentralisasi adalah salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2016:142).

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah daerah tergantung pada dana yang di berikan oleh pemerintah pusat/ provinsi. Dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat/provinsi adalah:

Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2005, adalah Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil sumber daya alam adalah bagian daerah berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Dana transfer lainnya adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang - undang. Dana transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya, dan pendapatan lainnya.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat/provinsi dapat diketahui melalui pengukuran dengan rasio ketergantungan daerah yang mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Menurut (Mahmudi, 2016:142), rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer dan total pendapatan. Semakin besar tingkat rasio ketergantungan daerah maka semakin besar pula ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana eksternal.

3. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Anshori, 2019:1116). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah.

4. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas (hasil guna) merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014:191). Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengumpulan pajak daerah, dalam hal ini dengan menggunakan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya yang ada di daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas di kategori kan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Halim, 2014:L-6).

5. Rasio Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, dan hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi, maka pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja guna menjaga fungsi anggaran agar tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2016:162). Rasio

keseerasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap total belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamis nya kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah di negara berkembang maka peranan pemerintah daerah dalam memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2014:L-8). Menurut (Mahmudi, 2016:164), rasio keseerasian antara lain berupa rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio Belanja modal terhadap Total Belanja.

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan, hasil dari rasio ini tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini dan suatu Pemerintah Daerah telah melaksanakan efisiensi belanja apabila rasio ini kurang dari 100%, namun jika rasio lebih dari 100% berarti tidak efisien (Mahmudi, 2016:166).

7. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, dan dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2014:L-12). Rasio pertumbuhan dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melakukan perhitungan pada data keuangan, mengolah data dalam format numerik, dan kemudian menyajikan gambaran atau tampilan data tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2019, sedangkan sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio keuangan daerah Kabupaten Jember untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan data-data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2. Menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Jember dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan dengan indikator kinerja keuangan,
3. Menginterpretasi hasil analisis dengan indikator sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

No.	Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
1.	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2.	10,01 - 20,00	Kurang
3.	20,01 - 30,00	Sedang
4.	30,01 - 40,00	Cukup
5.	40,01 - 50,00	Baik
6.	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2016:142)

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No.	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan	Ketergantungan Keuangan Daerah
1.	0,00 - 10,00	Sangat Rendah
2.	10,01 - 20,00	Rendah
3.	20,01 - 30,00	Sedang
4.	30,01 - 40,00	Cukup
5.	40,01 - 50,00	Tinggi
6.	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi (2016:142)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Persentase PAD terhadap Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
1.	0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2.	25% - 50%	Rendah	Konsultatif
3.	50% - 75%	Sedang	Partisipatif
4.	75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2016:143)

d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektivitas Pajak Daerah

No.	Daerah terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas Pajak Daerah
1.	>100	Sangat Efektif
2.	100	Efektif
3.	90 - 99	Cukup Efektif
4.	75 - 89	Kurang Efektif
5.	<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:143)

e. Rasio Keserasian

- 1) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:164) umumnya besarnya belanja operasi atas total belanja sebesar 60% – 90% dan untuk besarnya belanja modal atas total belanja sebesar 5% – 20%.

f. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

g. Rasio Pertumbuhan

- 1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PADTt} - \text{PADTt} - 1)}{\text{PADTt} - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{(\text{TPTt} - \text{TPTt} - 1)}{\text{TPTt} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

- PADTt : Pendapatan Asli Daerah Tahun t
 PADTt-1 : Pendapatan Asli Daerah Tahun t-1
 TPTt : Total Pendapatan Tahun t
 TPTt-1 : Total Pendapatan Tahun t-1

2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{(\text{BOTt} - \text{BOTt} - 1)}{\text{BOTt} - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{(\text{BMTt} - \text{BMTt} - 1)}{\text{BMTt} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

BOTt : Pendapatan Operasi Tahun t

BOTt-1 : Pendapatan Operasi Tahun t-1

BMTt : Belanja Modal Tahun t

BMTt-1 : Belanja Modal Tahun t-1

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Desentralisasi

Tabel 5. Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (1)	Total Pendapatan (2)	Derajat Desentralisasi (1:2)
1.	2016	524.137.897.017	3.192.000.871.973	16,42%
2.	2017	719.213.581.071	3.480.086.187.355	20,67%
3.	2018	597.509.388.023	3.588.873.174.515	16,65%
4.	2019	667.598.426.910	3.815.931.626.882	17,50%
5.		Rata-Rata		17,81%

Sumber : Data diolah, 2021

Derajat desentralisasi Pemerintah Jember berdasarkan tabel 5 mengalami fluktuasi, peningkatan derajat desentralisasi merupakan pengaruh tumbuhnya pendapatan pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Rata-rata derajat desentralisasi selama empat tahun adalah 17,81%, dibandingkan dengan derajat desentralisasi Kota Lhokseumawe sebesar 6,03% (Wahyuddin & Sugianal, 2017). Kabupaten Puncak Jaya yaitu 1,30% (Enumbi, 2021), Hal tersebut mempunyai arti bahwa derajat desentralisasi Pemda Jember memiliki derajat desentralisasi lebih bagus dibandingkan kedua daerah tersebut.

Fluktuatif derajat desentralisasi dan hasil derajat desentralisasi Pemerintah Jember yang lebih bagus dari kedua daerah tersebut, tidak membuat Pemerintah Jember termasuk mampu melaksanakan desentralisasi ini karena Pemda Jember termasuk kategori kurang. Berdasarkan hasil analisis derajat desentralisasi, terdapat perbandingan pendapatan asli daerah dan total pendapatan yang besar sehingga membuat derajat desentralisasi Pemerintah Jember tergolong kurang. Peneliti berasumsi hal tersebut dapat terjadi karena pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan penyumbang terbesar dalam PAD Pemerintah Jember realisasinya selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Tidak optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat menjadi alasan kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah. Pemerintah Jember dapat menaikkan pendapatan pajak daerah dengan mengoptimalkan intensifikasi pendapatan daerah yang berkaitan dengan pemutakhiran atau validasi data objek pajak, maksudnya jika terdapat perubahan atau perbedaan data di lapangan dengan basis data akan menyebabkan penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dari itu penting dilakukan penyesuaian data setiap tahunnya dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya adalah hal yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak daerah maka dari itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan Wajib Pajak dengan cara pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan dan pemeriksaan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

Kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah juga dapat terjadi karena belum optimalnya ekstensifikasi pendapatan daerah yang berkaitan dengan penjarangan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi baru. Untuk menambah pendapatan pajak daerah, Pemerintah Jember dapat menarik minat Wajib Pajak dengan cara memudahkan pendaftaran Wajib Pajak dengan sistem *Online* agar tidak menguras waktu, tenaga dan materi masyarakat dibandingkan dengan sistem *Offline*.

Selain pendapatan pajak daerah, lain-lain PAD yang sah juga merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Pendapatan BLUD diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Jember, pemerintah daerah dapat meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan cara menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik yang ada di RSUD Kabupaten Jember.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Pendapatan Transfer (1)	Total Pendapatan (2)	Rasio Ketergantungan (1:2)
1.	2016	2.653.013.228.456	3.192.000.871.973	83,11%
2.	2017	2.748.823.132.916	3.480.086.187.355	78,99%
3.	2018	2.813.783.402.499	3.588.873.174.515	78,40%
4.	2019	2.961.401.173.862	3.815.931.626.882	77,61%
5.		Rata-Rata		79,53%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki rata-rata 79,53%, jika dihubungkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lamongan sebesar 66,30% (Anshori, 2019). Dapat dilihat tingkat ketergantungan Pemerintah Jember lebih tinggi. Walau ketergantungan keuangan Pemerintah Jember lebih tinggi dari Kabupaten Lamongan, Pemerintah Jember termasuk dalam kategori mempunyai ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, artinya pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat/provinsi.

Berdasarkan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, komponen DAU yang termasuk pada Dana Perimbangan Pemerintah Jember menjadi penyebab rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah sangat tinggi. Peneliti berasumsi hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Jember masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal belanja pegawai, ketidakmampuan Pemerintah Jember dalam menganggarkan belanja pegawai dari PAD membuat pemerintah pusat membantu mendanai belanja pegawai tersebut sehingga membuat DAU sangat besar nominalnya

Sangat Tingginya ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Jember terhadap bantuan dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Jember mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan penting lainnya, salah satunya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jember. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah menetapkan batas atas untuk belanja pegawai dan membuat batas minimum belanja modal agar dapat menjadi investasi yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Jember, sehingga nantinya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Jember dapat mendanai kegiatan pembangunan yang akan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (1)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (2)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (1:2)
1.	2016	524.137.897.017	2.653.013.228.456	19,76%
2.	2017	719.213.581.071	2.748.823.132.916	26,16%
3.	2018	597.509.388.023	2.813.783.402.499	21,24%
4.	2019	667.598.426.910	2.961.401.173.862	22,54%
5.		Rata-Rata		22,42%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2019 memperlihatkan fluktuatif. Itu karena terdapat peningkatan dan penurunan pada pendapatan asli daerah, hal tersebut dapat terjadi karena kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan penyumbang terbesar pada komponen PAD.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah 22,42%, jika dihubungkan dengan rasio kemandirian Kabupaten Muna 5,57% (Dali *et al*, 2021). Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jember jauh melebihi Kabupaten Muna, meskipun rasio kemandirian keuangan daerah Jember tergolong rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif artinya pemerintah daerah pemerintah daerah tergolong sebagai pemerintah yang tidak dapat melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Jember masih belum mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali menjadikan keuangan daerah Kabupaten Jember untuk mengeluarkan biaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Peneliti berasumsi ketidakmampuan Pemerintah Jember untuk menjalankan pembangunan dan pemerintahannya secara mandiri disebabkan pendapatan asli daerah yang kecil daripada total pendapatan transfer.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jember menunjukkan rendah sekali, dikategorikan sebagai pola hubungan yang instruktif hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Jember tidak mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Jember adalah meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara yang sama pada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada pembahasan derajat desentralisasi.

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (1)	Target Penerimaan Pajak Daerah (2)	Rasio Efektivitas Pajak Daerah (1:2)
1.	2016	136.545.418.829	139.850.025.000	97,64%
2.	2017	160.400.490.400	160.839.061.620	99,73%
3.	2018	182.682.475.898	185.222.247.938	98,63%
4.	2019	191.800.060.051	202.584.747.938	94,68%
5.		Rata-Rata		97,67%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio efektivitas pajak daerah tahun 2016-2019 memperlihatkan penurunan dan kenaikan, rasio efektivitas pajak daerah tergolong cukup efektif. Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Jember selama 4 tahun adalah 97,67% berbeda dengan daerah lainnya, rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Lamongan sebesar 95,44% (Anshori, 2019). Itu dikarenakan pemerintah merealisasikan target pajak daerah dengan cukup efektif.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pajak daerah, Pemerintah Jember memiliki kinerja yang baik untuk merealisasikan target pajak daerah, dilihat setiap tahun rasio efektivitas termasuk dalam kategori cukup efektif. Meski rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Jember dikategorikan cukup efektif, efektivitas pajak daerah juga harus diukur dalam keberhasilan Pemerintah Jember dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maksudnya karena efektif atau tidaknya dilihat dari perbandingan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil/manfaat yang diterima masyarakat. Peneliti berasumsi bahwa Pemerintah Jember efektif dalam hal pungutan pajak kabupaten/kota, peneliti melihat ini karena semakin baiknya pelayanan dan fasilitas publik yang diberikan Pemerintah Jember kepada masyarakatnya.

5. Rasio Keserasian

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Total Belanja Operasi (1)	Total Belanja (2)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (1:2)
1.	2016	2.505.857.010.319	2.979.940.928.164	84,09%
2.	2017	2.430.751.180.331	3.558.375.056.145	68,31%
3.	2018	2.469.099.279.895	3.450.097.455.532	71,57%
4.	2019	2.648.219.127.460	3.876.912.578.274	68,31%
5.		Rata-Rata		73,07%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio belanja operasi atas total belanja menunjukkan fluktuatif, hal tersebut dikarenakan alokasi belanja atas belanja operasi terjadi pengurangan dan kenaikan. Rasio belanja operasi atas total belanja Pemda Jember adalah 73,07% jika memadankan dengan daerah lainnya, rata-rata rasio belanja operasi atas total belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah 66% (Korompot & Warongan, 2017). Ini menunjukkan bahwa dari total belanja yang dimiliki kedua pemerintah tersebut, Pemerintah Jember banyak mengeluarkan untuk belanja operasional dari pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 10. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Total Belanja Modal (1)	Total Belanja (2)	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (1:2)
1.	2016	460.451.300.847	2.979.940.928.164	15,45%
2.	2017	708.870.975.184	3.558.375.056.145	19,92%
3.	2018	532.247.571.649	3.450.097.455.532	15,43%
4.	2019	731.597.027.830	3.876.912.578.274	18,87%
5.		Rata-Rata		17,42%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio belanja modal atas total belanja menunjukkan fluktuatif, rasio belanja modal atas total belanja adalah 17,42% jika dikaitkan dengan daerah lainnya, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah 21,5% (Korompot & Warongan, 2017). Ini menunjukkan bahwa dari total belanja yang dimiliki kedua pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak digunakan untuk belanja modal dari Pemerintah Jember.

Berdasarkan hasil analisis rasio keserasian, sebagian besar dana Pemerintah Jember masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dan belanja modal yang dilakukan masih relatif kecil. Peneliti berasumsi belanja operasi Pemerintah Jember disebabkan oleh belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang begitu besar sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan lainnya dengan leluasa termasuk belanja modal, pemerintah dapat menekan pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang begitu besar dengan menentukan batas atasnya sehingga dapat menekan pengeluaran yang begitu banyak.

6. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 11. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi Belanja (1)	Anggaran Belanja (2)	Rasio Efisiensi Belanja (1:2)
1.	2016	2.979.940.928.164	3.645.689.713.638	81,74%
2.	2017	3.558.375.056.145	4.187.962.514.393	84,97%
3.	2018	3.450.097.455.532	4.163.624.940.932	82,86%
4.	2019	3.876.912.578.274	4.557.690.425.658	85,06%
5.		Rata-Rata		83,66%

Sumber : Data diolah, 2021

Rasio efisiensi belanja daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio efisiensi belanja adalah 83,66%, jika dilihat rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Lamongan 94,06% Anshori (2019). Kabupaten Jember relatif lebih efisien dari Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja, realisasi anggaran belanja Pemerintah Jember tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Efisien atau tidaknya suatu belanja pemerintah daerah dapat dilihat dari realisasi yang telah dilakukan pemerintah daerah tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dengan melihat dampak yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik dan pelayanan lainnya.

Peneliti berasumsi sesuai dengan penjelasan tersebut Pemerintah Jember efisien dalam melakukan belanja daerahnya, hal tersebut dikarenakan fasilitas, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik telah diberikan pemerintah daerah dengan baik dan dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat.

7. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi PAD Tahun t (1)	Realisasi PAD Tahun t-1 (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan PAD ((1-2):2)
1.	2016	524.137.897.017	461.882.363.147	62.255.533.870	13,48%
2.	2017	719.213.581.071	524.137.897.017	195.075.684.054	37,22%
3.	2018	597.509.388.023	719.213.581.071	(121.704.193.048)	-16,92%
4.	2019	667.598.426.910	597.509.388.023	70.089.038.887	11,73%
5.			Rata-Rata		11,38%

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan Tahun t (1)	Realisasi Pendapatan Tahun t-1 (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan ((1-2):2)
1.	2016	3.192.000.871.973	3.116.544.378.911	75.456.493.062	2,42%
2.	2017	3.480.086.187.355	3.192.000.871.973	288.085.315.382	9,03%
3.	2018	3.588.873.174.515	3.480.086.187.355	108.786.987.160	3,13%
4.	2019	3.815.931.626.882	3.588.873.174.515	227.058.452.367	6,33%
5.			Rata-Rata		5,22%

Sumber : Data diolah, 2021

Pertumbuhan pada tabel 12 dan 13 mengalami kenaikan dan penurunan, dengan rasio pertumbuhan PAD 11,38% dan rasio pertumbuhan pendapatan 5,22%. Menurut perhitungan rasio tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang positif, ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan PAD Pemda Jember, apabila dibandingkan dengan daerah lainnya rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Sulawesi Utara adalah 15,1% dan 20,6% (Korompot & Warongan, 2017). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dialami Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Jember.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 14. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi Belanja Operasi Tahun t (1)	Realisasi Belanja Operasi Tahun t-1 (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi ((1-2):2)
1.	2016	2.505.857.010.319	2.513.265.600.860	(7.408.590.541)	-0,29%
2.	2017	2.430.751.180.331	2.505.857.010.319	(75.105.829.988)	-3,00%
3.	2018	2.469.099.279.895	2.430.751.180.331	38.348.099.564	1,58%
4.	2019	2.648.219.127.460	2.469.099.279.895	179.119.847.565	7,25%
5.			Rata-Rata		1,39%

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 15. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2019

No.	Tahun	Realisasi Belanja Modal Tahun t (1)	Realisasi Belanja Modal Tahun t-1 (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal ((1-2):2)
1.	2016	460.451.300.847	556.408.885.143	(95.957.584.296)	-17,25%
2.	2017	708.870.975.184	460.451.300.847	248.419.674.337	53,95%
3.	2018	532.247.571.649	708.870.975.184	(176.623.403.535)	-24,92%
4.	2019	731.597.027.830	532.247.571.649	199.349.456.181	37,45%
5.			Rata-Rata		12,31%

Sumber : Data diolah, 2021

Pertumbuhan pada tabel 14 dan 15 mengalami kenaikan dan penurunan, dengan rasio 1,39% dan 12,31%, pertumbuhan belanja diikuti pertumbuhan pendapatan, apabila dibandingkan dengan rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal Pemerintah Daerah Sulawesi Utara adalah 18,1% dan 25,1% (Korompot & Warongan, 2017). Ini menunjukkan karena pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Utara yang lebih besar dari Pemerintah Jember maka pertumbuhan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga lebih besar dari Pemerintah Jember.

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja Pemerintah Jember mengalami fluktuasi. Peneliti berasumsi bahwa pertumbuhan pendapatan disebabkan karena dampak dari naik turunnya dana alokasi umum tiap tahunnya, dana tersebut juga menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah Kabupaten Jember dan pertumbuhan belanja disebabkan adanya naik turunnya belanja operasi dalam hal belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang dilakukan Pemerintah Jember, meskipun dalam hal pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja Pemerintah Jember mengalami fluktuasi akan tetapi pertumbuhannya masih dapat dikatakan positif.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan, kinerja keuangan Pemerintah Jember dilihat dari: Rasio efektivitas pajak daerah kategori cukup efisien. Rasio belanja operasi atas total belanja lebih besar dari rasio belanja modal atas total belanja. Rasio efisiensi belanja kategori efisien. Rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan memiliki pertumbuhan yang positif. Rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal memiliki pertumbuhan yang positif.

Namun demikian terdapat beberapa rasio yang mempunyai hasil yang belum baik, yaitu, derajat desentralisasi kategori kurang, rasio ketergantungan kategori sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah kategori rendah sekali dan berada pada pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini dan perlu adanya perbaikan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah peneliti tidak menemukan indikator baku untuk menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, sehingga peneliti hanya menggunakan indikator yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pemerintah daerah untuk mengetahui aturan yang baku untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Untuk Pemerintah Jember perlu lebih memaksimalkan seluruh asal pendapatan baik berupa PAD, dana perimbangan, juga lain-lain pendapatan wilayah yang absah agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Jember disarankan untuk mencari alternatif lain untuk meningkatkan PAD, mengingat kondisi dan kemungkinannya agar tidak semakin bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah Jember memiliki strategi pembangunan yang sangat lemah dan sensitif terhadap faktor eksternal dan perubahan ekonomi di luar daerah, Pemerintah Jember harus fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, serta memperhatikan pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1113-1132.

- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 6(1), 319–336.
- Enumbi, Y. (2021). An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(1), 709–721.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Jurnal Accountability*, 6(2), 9–19.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.
- Wahyuddin, & Sugianal, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 51–60.